

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1.1 Deskripsi Data**

**1.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

Deskripsi responden penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden ini berupa jenis kelamin, usia responden, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan asal wilayah/domisili responden. Jumlah responden yang dapat diolah sebanyak 100 (seratus) responden yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi di 3 KPP Pratama Bandar Lampung.

**Tabel 4.1**  
**Data Responden**

| No | Jenis Kategori     | Keterangan              | Jumlah | Presentase |
|----|--------------------|-------------------------|--------|------------|
| 1  | Jenis Kelamin      | 1) Laki-laki            | 70     | 70 %       |
|    |                    | 2) Perempuan            | 30     | 30 %       |
| 2  | Usia Responden     | 1) < 25 tahun           | 9      | 9 %        |
|    |                    | 2) 25-35 tahun          | 29     | 29 %       |
|    |                    | 3) 36-45 tahun          | 42     | 42 %       |
|    |                    | 4) 45-55 tahun          | 20     | 20 %       |
|    |                    | 5) > 55 tahun           | -      | -          |
| 3  | Jenis Pekerjaan    | 1) Karyawan Swasta      | 32     | 32 %       |
|    |                    | 2) Pegawai Negeri Sipil | 27     | 27 %       |
|    |                    | 3) Lainnya              | 41     | 41 %       |
| 4  | Tingkat Pendidikan | 1) SMA                  | 16     | 16 %       |
|    |                    | 2) Diploma              | 27     | 27 %       |
|    |                    | 3) S1                   | 47     | 47 %       |
|    |                    | 4) S2                   | 7      | 7 %        |
|    |                    | 5) Lainnya              | 3      | 3 %        |
| 5  | Asal               | 1) KPP Pratama Kedaton  | 35     | 35 %       |

|  |                  |                               |    |      |
|--|------------------|-------------------------------|----|------|
|  | Wilayah/Domisili | 2) KPP Pratama Tanjung Karang | 39 | 39%  |
|  |                  | 3) KPP Pratama Teluk Betung   | 26 | 26 % |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dalam pengisian kuesioner dengan jumlah 70 responden, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 30 responden. Selanjutnya berdasarkan tabel tersebut usia responden yang berumur 36-45 tahun lebih mendominasi penelitian ini dengan jumlah 42 responden Wajib Pajak. Hal ini terjadi karena pada saat penelitian di setiap KPP Kota Bandar Lampung, Wajib Pajak yang ditemui yakni mereka yang bekerja sebagai PNS dan lebih mendominasi sebagai pengusaha. Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan yang lebih mendominasi yaitu pengusaha atau lainnya 41 responden. Jenjang pendidikan yang di tempuh rata-rata dengan gelar Strata Satu (S1) sejumlah 47 responden. Hal ini terjadi karena saat penyebaran kuesioner Wajib pajak yang di temui lebih banyak yang berpendidikan Strata Satu. Lalu domisili wajib pajak yang tersebar lebih banyak yaitu di KPP Pratama Tanjung Karang dengan jumlah 39 Responden. Hal ini terjadi karena jumlah Wajib Pajak yang terdaftar lebih banyak dibandingkan KPP Pratama lainnya.

#### **4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian**

##### **4.1.2.1 Data dan Sampel**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file dan data ini harus dicari melalui narasumber yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian (Wajib Pajak orang pribadi) ataupun orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data kutipan Sugiyono (2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran

kuesioner langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pada 3 KPP Pratama Bandar Lampung yang di antaranya yaitu KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Tanjung Karang, dan KPP Pratama Teluk Betung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung yang di antaranya KPP Pratama Kedaton, KPP Pratama Tanjung Karang, dan KPP Pratama Teluk Betung yang berjumlah sebesar 255.967 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2017. Sehingga presentase kelonggran yang digunakan adalah 10%. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, berikut perhitungannya:

$$n = \frac{255.967}{1+255.967(0,1)^2}$$

$$n = \frac{255.967}{2.560,67}$$

$$n = 99,96 \sim 100$$

Dari rumus diatas besar sampel yang dapat mewakili populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 100 kuesioner (WPOP) Kota Bandar Lampung. Penyebaran kuesioner dilakukan pada masing-masing KPP Pratama dengan jumlah kuesioner sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Sampel Penelitian**

| <b>Keterangan KPP Pratama</b>        | <b>Jumlah Sampel</b> | <b>Presentase</b> |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
| KPP Pratama Kedaton                  | 35                   | 35 %              |
| KPP Pratama Tanjung Karang           | 39                   | 39 %              |
| KPP Pratama Teluk Betung             | 26                   | 26 %              |
| <b>Jumlah Kuesioner yang disebar</b> | <b>100</b>           | <b>100 %</b>      |

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.2 diatas bahwa 100 kuesioner yang telah disebar ke 3 KPP Pratama dengan jumlah kuesioner berbeda pada KPP Pratama Kedaton sebanyak 35 kuesioner, KPP Pratama Tanjung Karang sebanyak 39 kuesioner, dan KPP

Pratama Teluk Betung sebanyak 26 kuesioner. Data yang dihimpun dari 100 responden tersebut, maka dapat disajikan informasi umum tentang responden yaitu dengan karakteristik usia wajib pajak, jenis kelamin wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, pekerjaan wajib pajak dan asal domisili tinggal wajib pajak yang dapat dilihat pada tabel 4.2.

## 1.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi data melalui penjabaran nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Descriptive Statistics**

|  | N   | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--|-----|---------|---------|------|----------------|
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | 100 | 3       | 5       | 4,22 | ,393           |
| Pengetahuan Perpajakan                     | 100 | 3       | 5       | 4,15 | ,433           |
| Sanksi Perpajakan                          | 100 | 3       | 5       | 4,22 | ,482           |
| Pemeriksaan Pajak                          | 100 | 3       | 5       | 4,27 | ,414           |
| Kepatuhan Wajib Pajak                      | 100 | 3       | 5       | 4,23 | ,398           |
| Valid N (listwise)                         | 100 |         |         |      |                |

Sumber : Output SPSS, 2018

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel. 4.3 terdapat jumlah responden sebanyak 100 responden dilihat bahwa :

- 1) Jawaban responden untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan rata-rata per pertanyaan mempunyai nilai minimum sebesar 3, nilai maximum sebesar 5, dan nilai *mean* sebesar 4,22 serta standar deviation 0,393 hal ini mengidentifikasi responden yang cenderung setuju terhadap Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung.

- 2) Jawaban responden untuk variabel Pengetahuan Perpajakan rata-rata per pertanyaan mempunyai nilai minimum sebesar 3, nilai maximum sebesar 5, dan *mean* sebesar 4,15 serta standar devation 0,433 hal ini mengidentifikasi responden yang cenderung setuju terhadap Pengetahuan Pepajakan yang semakin meluas dengan informasi yang di sosialisasikan oleh pihak pajak kota Bandar Lampung.
- 3) Jawaban responden untuk variabel Sanksi Pajak rata-rata per pertanyaan nilai minimum sebesar 3, nilai maximum sebesar 5, dan nilai *mean* sebesar 4,22 serta nilai standar deviation sebesar 0,482 hal ini menyatakan bahwa responden yang cenderung setuju terhadap Sanksi Pajak yang diberlakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung.
- 4) Jawaban responden untuk variabel Pemeriksaan Pajak rata-rata per pertanyaan nilai minimum sebesar 3, maximum sebesar 5, dan *mean* sebesar 4,27 serta standar deviation sebesar 0,414 hal ini menyatakan bahwa responden yang cenderung setuju terhadap Pemeriksaan Pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung.
- 5) Jawaban dari responden untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak rata-rata per pertanyaan nilai minimum sebesar 3, nilai maximum sebesar 5, dan *mean* sebesar 4,23 serta standar deviation sebesar 0,398 hal ini menyatakan bahwa responden sebagai wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandar Lampung mempunyai keadaan yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan haknya perpajakannya dengan sesuai.

## **1.2.2 Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas**

### **1.2.2.1 Uji Validitas**

Uji validitas yang ditujukan untuk mengukur seberapa nyata suatu pengujian atau instrumen. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data

dinyatakan valid jika nilai  $r_{hitung}$  yang merupakan dari Corrected Item-Total Correlation  $>$  dari  $r_{tabel}$  pada signifikan 0,05 (5%) (Ghozali, 2011). Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 20 diperoleh hasil uji validitas dan reabilitas kuesioner kelima variabel seperti dirangkuman pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas**

| Variabel  | No | Person Correlation Total | r tabel | Kondisi                  | Keterangan |
|---|----|--------------------------|---------|--------------------------|------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)                       | 1  | 0,764                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 2  | 0,669                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 3  | 0,501                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 4  | 0,773                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 5  | 0,792                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 6  | 0,760                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 7  | 0,707                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 8  | 0,747                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 9  | 0,761                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 10 | 0,556                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) | 1  | 0,699                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 2  | 0,636                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 3  | 0,613                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 4  | 0,620                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 5  | 0,497                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 6  | 0,531                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 7  | 0,492                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 8  | 0,706                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 9  | 0,609                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |
|   | 10 | 0,590                    | 0,196   | $r_{hitung} > r_{tabel}$ | Valid      |

|                                   |    |       |       |                    |       |
|-----------------------------------|----|-------|-------|--------------------|-------|
|                                   | 11 | 0,566 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 12 | 0,605 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
| Pengetahuan<br>Perpajakan<br>(X2) | 1  | 0,681 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 2  | 0,745 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 3  | 0,631 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 4  | 0,603 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 5  | 0,673 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 6  | 0,746 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 7  | 0,605 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
| Sanksi<br>Perpajakan<br>(X3)      | 1  | 0,774 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 2  | 0,808 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 3  | 0,797 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 4  | 0,713 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 5  | 0,563 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 6  | 0,523 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
| Pemeriksaan<br>Pajak (Z)          | 1  | 0,820 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 2  | 0,780 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 3  | 0,727 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 4  | 0,766 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 5  | 0,704 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |
|                                   | 6  | 0,715 | 0,196 | r hitung > r tabel | Valid |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi product moment untuk setiap item butir pertanyaan dengan skor total variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak adalah valid. Instrumen tersebut dikatakan valid karena mempunyai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,196) pada  $n = 100 - 2 = 98$  dengan signifikansi 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing per pertanyaan adalah valid. Maka dalam melakukan pengujian selanjutnya, 41 pertanyaan ini dapat digunakan kembali.

### 1.2.2.2 Uji Reabilitas

Pengujian dilakukan dengan per variabel menggunakan pernyataan yang terdapat didalam kuesioner. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Reabilitas**

| Variabel                                   | Cronbach's Alpha | Batas Reabilitas | Keterangan |
|--|------------------|------------------|------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak                      | 0,768            | 0,70             | Realibel   |
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | 0,747            | 0,70             | Realibel   |
| Pengetahuan Perpajakan                     | 0,764            | 0,70             | Realibel   |
| Sanksi Perpajakan                          | 0,767            | 0,70             | Realibel   |
| Pemeriksaan Pajak                          | 0,789            | 0,70             | Realibel   |

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan data tabel 4.5 diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian diatas mengatakan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,768. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ( $0,768 > 0,70$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikatakan realibel.
- 2) Hasil pengujian diatas mengatakan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan diperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,747. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ( $0,747 > 0,70$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dikatakan realibel.
- 3) Hasil pengujian diatas mengatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan diperoleh nilai cronbach's alpha sebesar 0,764. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ( $0,764 > 0,70$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap Pengetahuan Perpajakan dikatakan realibel.



- 4) Hasil pengujian diatas mengatakan bahwa variabel Sanksi Perpajakan diperoleh nilai cronbanch's alpha sebesar 0,767. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ( $0,767 > 0,70$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap Sanksi Pajak dikatakan realibel.
- 5) Hasil pengujian diatas mengatakan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak diperoleh nilai cronbanch's alpha sebesar 0,789. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 ( $0,789 > 0,70$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap Pemeriksaan Pajak dikatakan realibel.

### 1.2.3 Analisis Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |        |      |                         |       |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)                | 12,306                      | 3,423      |                           | 3,595  | ,001 |                         |       |
| MSAP                      | -,074                       | ,076       | -,088                     | -,978  | ,330 | ,564                    | 1,774 |
| PP                        | ,657                        | ,120       | ,500                      | 5,467  | ,000 | ,545                    | 1,833 |
| 1 SP                      | ,532                        | ,124       | ,387                      | 4,281  | ,000 | ,559                    | 1,790 |
| ModeratingX1Z             | ,054                        | ,033       | ,129                      | 1,646  | ,103 | ,739                    | 1,353 |
| ModeratingX2Z             | -,057                       | ,043       | -,096                     | -1,334 | ,186 | ,887                    | 1,128 |
| ModeratingX3Z             | ,068                        | ,028       | ,194                      | 2,438  | ,017 | ,719                    | 1,390 |

a. Dependent Variable: KWP  
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y : 12,306 + (-0,074) (X1) + 0,657 (X2) + 0,532(X3) + 0,054 (X1Z) + (-0,057) (X2Z) + 0,0168 (X3Z) + e$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
- X2 : Pengetahuan Perpajakan
- X3 : Sanksi Perpajakan
- Z : Pemeriksaan Pajak
- E : Koefisien *error*

Persamaan tersebut mengandung arti bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar (12,306) berarti bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Pajak (X3), Pemeriksaan Pajak (Z) akan naik sebesar 123,06 %.
- 2) Koefisien regresi variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) sebesar (-0,074). Hal ini menyatakan bahwa apabila variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan menurun, maka terjadi penurunan sebesar 7,4 % dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 3) Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) sebesar (0,657). Hal ini menyatakan bahwa apabila variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat, maka terjadi peningkatan sebesar 65,7 % dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 4) Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,532. Hal ini menyatakan bahwa apabila variabel Sanksi Pajak meningkat, maka terjadi peningkatan sebesar 53,2 % dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 5) Koefisien regresi variabel moderating (X1Z) sebesar 0,054. Hal ini menyatakan bahwa apabila variabel moderating Pemeriksaan Pajak memperkuat hubungan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak, maka terjadi peningkatan sebesar 5,4 % dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

- 6) Koefisien regresi variabel moderating (X2Z) sebesar (-0,057). Hal ini menyatakan bahwa apabila variabel moderating Pemeriksaan Pajak memperlemah hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka terjadi penurunan sebesar 5,7 % dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 7) Koefisien regresi variabel moderating (X3Z) sebesar 0,168. Hal ini menyatakan bahwa apabila variabel moderating Pemeriksaan Pajak memperkuat hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka terjadi peningkatan sebesar 16,8 % dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

#### 1.2.4 Uji Asumsi Klasik

##### 1.2.4.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t_{-1}$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan probel autokorelasi. Hasil uji autokorelasi terhadap model regresi, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |               |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | ,759 <sup>a</sup> | ,576     | ,549              | 2,674                      | 2,154         |

a. Predictors: (Constant), ModeratingX3Z, PP, ModeratingX2Z, ModeratingX1Z, MSAP, SP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Dari hasil pengujian Durbin Watson pada tabel 4.7 diatas diperoleh nilai DW sebesar 2,154 Pada jumlah sampel sebesar 100 dengan 3 variabel independen

sehingga dapat diperoleh nilai dL sebesar 1,6131 dan dU sebesar 1,7364. Sesuai dengan kaidah pengujian dimana  $dU < dW < 4-dU$  yaitu  $1,7364 < 2,154 < 2,2636$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari permasalahan autokorelasi ( tidak terjadi atokorelasi) dan layak digunakan dalam penelitian.

#### 1.2.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut-off* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  dan nilai VIF  $\geq 10$  (Ghozali, 2013).

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

| Coefficients <sup>a</sup> |                             |            |                           |        |      |                         |       |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| (Constant)                | 12,306                      | 3,423      |                           | 3,595  | ,001 |                         |       |
| MSAP                      | -,074                       | ,076       | -,088                     | -,978  | ,330 | ,564                    | 1,774 |
| PP                        | ,657                        | ,120       | ,500                      | 5,467  | ,000 | ,545                    | 1,833 |
| 1 SP                      | ,532                        | ,124       | ,387                      | 4,281  | ,000 | ,559                    | 1,790 |
| ModeratingX1Z             | ,054                        | ,033       | ,129                      | 1,646  | ,103 | ,739                    | 1,353 |
| ModeratingX2Z             | -,057                       | ,043       | -,096                     | -1,334 | ,186 | ,887                    | 1,128 |
| ModeratingX3Z             | ,068                        | ,028       | ,194                      | 2,438  | ,017 | ,719                    | 1,390 |

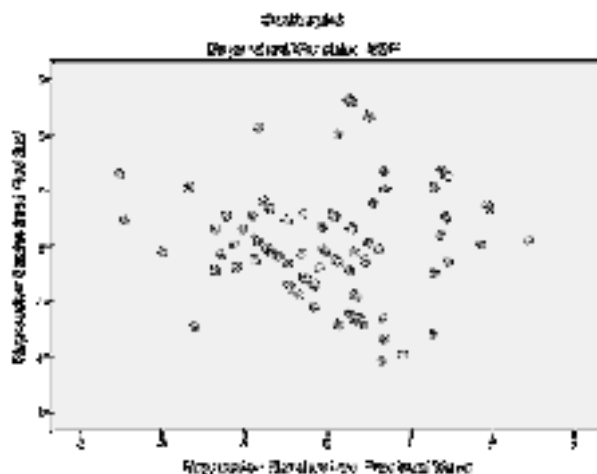
a. Dependent Variable: KWP  
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan keenam variabel bebas yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, moderatingx1z, moderatingx2z, moderatingx3z memiliki nilai *Tolerance*  $>$

0,10 dan tidak ada nilai VIF < 10. Sehingga dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi layak untuk digunakan.

#### 1.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji analisis varians melalui pengujian secara statistik. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan dengan uji scatterplot dapat dilihat tidak membentuk suatu pola dan menggumpal namun menyebar sehingga dapat dikatakan data tidak heteros. Dalam penelitian ini menggunakan uji scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak ada yang membentuk pola, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

### 1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

#### 4.3.1 Uji Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2011).

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Determinan**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | ,759 <sup>a</sup> | ,576     | ,549              | 2,674                      |

a. Predictors: (Constant), ModeratingX3Z, PP, ModeratingX2Z, ModeratingX1Z, MSAP, SP  
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan nilai (R) sebesar 0,759 atau 75,9 %. Nilai R Square ( $R^2$ ) yang diperoleh pada penelitian ini yaitu 0,576 atau 57,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandar Lampung di pengaruhi variabel independen. Sedangkan sisanya yaitu 42,4 % dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.3.2 Uji F

Untuk mengetahui apakah suatu model regresi layak digunakan atau tidak, perlu dilakukan uji kelayakan model melalui pengujian secara statistik. Apabila nilai F signifikan pada tingkat profitabilitas 5%, dinyatakan bahwa model regresi layak digunakan. Hasil uji statistik F disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji f**

ANOVA<sup>a</sup>

| Model        | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 904,748        | 6  | 150,791     | 21,088 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual     | 665,012        | 93 | 7,151       |        |                   |
| Total        | 1569,760       | 99 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), ModeratingX3Z, PP, ModeratingX2Z, ModeratingX1Z, MSAP, SP  
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 21,088 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan  $f_{tabel}$  sebesar 2,70 dengan signifikansi 0,05. Karena tingkat signifikansinya jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y.

### 4.3.3 Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada atau tidaknya signifikansi konstanta dan pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 20, diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model         | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|               | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| (Constant)    | 12,306                      | 3,423      |                           | 3,595  | ,001 |
| MSAP          | -,074                       | ,076       | -,088                     | -,978  | ,330 |
| PP            | ,657                        | ,120       | ,500                      | 5,467  | ,000 |
| SP            | ,532                        | ,124       | ,387                      | 4,281  | ,000 |
| ModeratingX1Z | ,054                        | ,033       | ,129                      | 1,646  | ,103 |
| ModeratingX2Z | -,057                       | ,043       | -,096                     | -1,334 | ,186 |
| ModeratingX3Z | ,068                        | ,028       | ,194                      | 2,438  | ,017 |

a. Dependent Variable: KWP  
Sumber: Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.11 diatas bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak memiliki nilai signifikansi  $< 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .  $t_{tabel}$  pada penelitian ini yaitu sebesar 1,660 yang berartikan secara individu berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yang artinya tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel yang menggunakan moderating pada ModeratingX3Z nilai signifikansi  $< 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yang artinya memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen sedangkan pada ModeratingX1Z dan ModeratingX2Z nilai signifikansi  $> 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yang artinya tidak memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### **4.3.3.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.11 *Coefficient* nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$



yaitu  $(-0,978) < 1,660$  dan pada kolom Sig. menunjukkan hasil uji t diketahui nilai signifikan  $0,330 > 0,05$  yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.3.3.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.11 diatas hasil uji t diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $5,467 > 1,660$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

#### **4.3.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas sanksi perpajakan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.11 diatas pada kolom sig. menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan, karena Sig. sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $4,821 > 1,660$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

#### **4.3.3.4 Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan tabel 4.11 diatas pada kolom Sig.  $0,103 > 0,05$  menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memperkuat adanya hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu

juga jika dilihat dari  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,646 < 1,660$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memperkuat hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan Hipotesis keempat ( $H_4$ ) ditolak.

#### **4.3.3.5 Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan tabel 4.11 diatas pada kolom Sig.  $0,186 > 0,05$  menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memperkuat adanya hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga jika dilihat dari  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $(-1,334) < 1,660$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan Hipotesis kelima ( $H_5$ ) ditolak.

#### **4.3.3.6 Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.12 diatas pada kolom Sig.  $0,017 < 0,05$  menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memperkuat adanya hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga jika dilihat dari  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $2,438 > 1,660$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan Hipotesis keenam ( $H_6$ ) diterima.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Hipotesis Penelitian**

|    | <b>Hipotesis Penelitian</b>  | <b>Hasil Uji</b> |
|----|--|------------------|
| H1 | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi   | Ho ditolak       |
| H2 | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi   | Ha diterima      |
| H3 | Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  | Ha diterima      |
| H4 | Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi | Ho ditolak       |
| H5 | Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi                     | Ho ditolak       |
| H6 | Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi                          | Ha diterima      |

#### **4.4 Pembahasan**

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan analisis untuk membuktikan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Variabel Moderating yang memenuhi kewajibannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang berada di Kota Bandar Lampung.

#### **4.4.1 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika program modernisasi ini telah ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolution. Rahayu (2013) mengatakan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan didukung dengan pelayanan e-system yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Banking*, *e-Billing* yang akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Administrasi Modern adalah sistem administrasi yang mengalami penyempurnaan atau pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak.

Namun pada penelitian ini modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sebab penerapan sistem administrasi yang kurang efisien dan efektif. Sebagian besar Wajib Pajak kecewa dengan sistem yang berlaku. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Aini (2017) dan Boymau (2016) yang mengatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan hasil tersebut dikarenakan berbeda pendapat dari wajib pajak orang pribadi dan perbedaan domisili yang di tempati sangat berbeda karena domisili replika lebih maju dalam menerapkakan sistem pajak dibandingkan domisili di Kota Bandar Lampung. Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif agar tujuan modernisasi untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

#### **4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak dan perhitungan pajak terutang, serta pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelampiran pajak akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Witono (2013) dalam Rahmawati (2014) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin Wajib Pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai Wajib Pajak. Menurut Fallan (1999) dalam Rahayu (2013) memberikan, kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Aini (2017) yang mengatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Sanksi perpajakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pencegah untuk melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2016) Sanksi perpajakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan sanksi perpajakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Jika wajib pajak memandang sanksi perpajakan akan banyak merugikan maka wajib pajak akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2016) Hal ini membuktikan hasil penelitian bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya sanksi yang berat maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil diatas di nyatakan sejalan dengan hasil penelitian Aini (2017) yang membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.4 Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum. Tujuan terutama pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Untuk menentukan mana wajib pajak yang akan diperiksa, telah diintoduser suatu sistem pemilihan yang didasarkan pada kriteria objektif dengan menggunakan beberapa variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Pelaksanaan sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang diatur suatu negara pelaksanaanya yang secara historis harus juga mempertimbangkan budaya negara yang bersangkutan. Secara umum pemeriksaan pajak program dan kegiatan dalam reformasi dan modernisasi perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak Nerre (2001) dalam Rahayu (2013). Menurut hasil penelitian Aini (2017) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi pada realitanya bahwa sistem administrasi yang modern tidak bisa mendukung pelayanan pada pembayaran pajak. Jadi hasil pada penelitian ini pemeriksaan pajak memperlemah hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan hasil

penelitian diatas bahwa tidak sejalan dengan Boymau (2016) yang mengatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan dengan adanya pemeriksaan pajak memperkuat hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini dikarenakan hasil beta dan signifikan yang berbeda.

#### **4.4.5 Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Dalam melakukan pemeriksaan pajak harus didasari oleh pedoman pemeriksaan pajak serta pengetahuan perpajakan yang luas. Kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang adil Fallan (1999) dalam Rahayu (2013).

Rahayu (2013) Serangkaian pemeriksaan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik dengan pencarian informasi-informasi tertentu. Menurut hasil penelitian Aini (2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun wajib pajak pada penelitian ini tidak berempati dalam menerapkan suatu pengetahuan perpajakannya untuk patuh terhadap kewajibannya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian Pemeriksaan Pajak tidak dapat memoderating atau memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil tersebut tidak ada peneliti terdahulu dan peneliti membuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

#### **4.4.6 Pemeriksaan Pajak sebagai variabel moderating dapat memperkuat Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satu tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember-2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak badan ataupun wajib pajak orang pribadi terpilih berdasarkan skor risiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi. Penggunaan sistem kriteria seleksi semacam ini dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam menentukan pilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, karena mekanisme pemilihannya berdasarkan beberapa variabel (Rahayu, 2013).

Hasil penelitian Aini (2017) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi pada penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak tidak bisa mengurangi unsur subjektivitas dalam menentukan Wajib Pajak yang akan diperiksa dan sanksi pajak pun tidak bisa membuat jera Wajib Pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada pemeriksaan pajak memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian diatas dinyatakan sejalan dengan hasil penelitian Boymau (2016) yang mengatakan bahwa moderasi dari pemeriksaan pajak berpeluang memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.